

**ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM
PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PADA MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN
KENANGAN BARU KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area

OLEH:

ANJUYTO HUTABARAT

188520173

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

Document Accepted 14/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Nama : Anjuyto Hutabarat

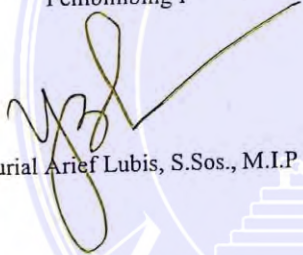
NPM : 188520173


Prodi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.I.P

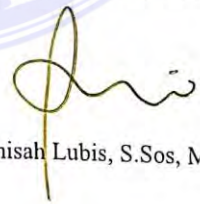

Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol

Ka. Prodi Administrasi Publik


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya tulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun yang menjadi bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah di tulis sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang telah berlaku, apabila dikemudian hari ditemukannya plagiat dalam Skripsi ini.

Medan, Oktober 2022



Anjuyto Hutabarat

188520173

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anjuyto Hutabarat
NPM : 188520173
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



188520173

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat dengan sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan tujuan pengentasan kemiskinan serta merubah pola pikir masyarakat untuk lebih maju. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kinerja aparatur pemerintahan dan apa saja hambatannya dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat miskin di Kelurahan Kenangan Baru. Penelitian menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan menggunakan analisis data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Hasil Penelitian ini dengan menggunakan teori dari Mondy, Noe dan Premeaux mengenai pengukuran kinerja dengan 6 dimensi yaitu Kuantitas pekerjaan; Penyaluran PKH telah terlaksanakan dengan baik, Kualitas pekerjaan; Belum tepatnya sasaran dan waktu penyaluran dana, kemandirian aparatur; belum mampu bekerja dengan minim bantuan orang lain, Inisiatif; dalam menanggapi masalah data pendamping PKH mengunjungi rumah KPM, Adaptasi; pendamping PKH beradaptasi dengan baik kepada KPM dalam kegiatan bulanan, Kerjasama; kurangnya koordinasi antara pendamping dan aparatur di Kelurahan. Hambatan dalam Penyaluran PKH yaitu tidak sinkronnya data KPM, Kurangnya partisipasi KPM dalam kegiatan bulanan, terbatasnya SDM pendamping yang mempengaruhi hasil kerja menjadi kurang maksimal, Dana yang tidak tersalurkan mengakibatkan masyarakat bermalas-malasan dalam kegiatan bulanan dan tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi. Sebaiknya aparat pemerintah memilih SDM yang lebih berkompeten dan melakukan pengawasan pada aparatur penyalur PKH.

Kata kunci: kinerja, aparatur pemerintah, masyarakat miskin.

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a conditional cash transfer targeting Very Poor Families (KSM) with the aim of alleviating poverty and changing people's mindsets to be more advanced. The purpose of the study is to analyze the performance of government officials and what are the obstacles in distributing the Family Hope Program (PKH) to the poor in Kenangan Baru Village. The research uses a qualitative approach by using data analysis, data reduction, data presentation and decision making. The results of this study using the theory of Mondy, Noe and Premeaux regarding performance measurement with 6 dimensions, namely the quantity of work; PKH distribution has been carried out well, Quality of work; Not yet precise target and timing of distribution of funds, independence of the apparatus; have not been able to work with minimal help from others, Initiative; in response to data problems PKH companions visited KPM homes, Adaptation; PKH assistants adapt well to KPM in monthly activities, Cooperation; lack of coordination between assistants and apparatus in the Kelurahan. Barriers to the distribution of PKH are not synchronizing KPM data, lack of KPM participation in monthly activities, limited human resources that affect work results to be less than optimal, funds that are not channeled cause people to be lazy in monthly activities and of course affect economic conditions. It is better if the government apparatus chooses more competent human resources and supervises the PKH distribution apparatus.

Keywords: *performance, government apparatus, poor society*

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Anjuyto Hutabarat anak dari Bapak Lamdor Hutabarat dan Ibu Dermawati Manalu, lahir di Kampung Baru, 24 Februari 1999. Penulis merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar (SD) 131/1 Jangga Baru pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 24 Batang Hari dan melanjutkan kembali ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 9 Batang Hari pada tahun 2014 dan Lulus pada tahun 2017.

Penulis melanjutkan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Medan Area pada tahun 2018 dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, hingga saat ini penulis masih menjalani proses perkuliahan di Universitas tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

Tugas akhir ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Medan Area. Dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis mendapat berbagai arahan, masukan dari pihak-pihak yang bersangkutan, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis yang selalu memberikan Doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Khairunnisah, S.Sos, M.I.Pol selaku Kepala Prodi Administrasi Publik.
5. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.I.P selaku Dosen pembimbing1 yang membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si selaku Dosen pembimbing 2 yang membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Ibu Chairika Nasution, S.AP., M.AP. selaku Sekretaris dalam skripsi ini.
8. Seluruh dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.

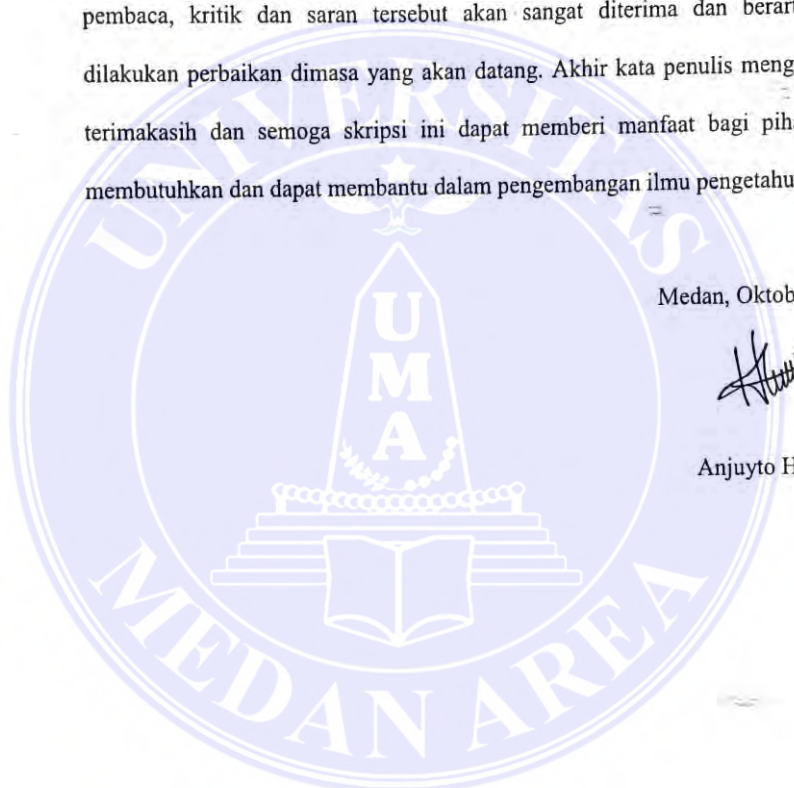
9. Bapak Rizal Arifin, S.STP selaku Kepala Lurah Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
10. Teman-teman terdekat yang selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dari pembaca, kritik dan saran tersebut akan sangat diterima dan berarti untuk dilakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Oktober 2022



Anjuyto Hutabarat



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Analisis	7
2.2 Kinerja.....	8
2.2.1 Pengertian Kinerja.....	8
2.2.2 Pengukuran Kinerja Pegawai	8
2.2.3 Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja	9
2.2.4 Meningkatkan Kinerja Aparatur.....	11
2.3 Aparatur Pemerintahan	12
2.4 Program Keluarga Harapan (PKH).....	12
2.5 Kemiskinan	17
2.5.1 Pengertian Kemiskinan.....	17
2.5.2 Ukuran Kemiskinan.....	18

2.6	Kelurahan Kenangan Baru.....	20
2.7	Penelitian Terdahulu	22
2.8	Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Lokasi dan Waktu Dilaksanakan Penelitian	28
3.2	Jenis dan Tipe penelitian.....	29
3.3	Informan Penelitan.....	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5	Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Hasil Penelitian	36
4.1.1	Sejarah Kelurahan Kenangan Baru	36
4.1.2	Kondisi Geografis Kelurahan Kenangan Baru.....	38
4.1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	39
4.1.4	Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kenangan Baru	39
4.1.5	Visi Dan Misi Kantor Kelurahan Kenangan Baru	40
4.1.6	Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Kenangan Baru.....	41
4.1.7	Tugas Pokok dan Fungsi di Kelurahan Kenangan Baru	41
4.2	Pembahasan	49
4.2.1	Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam Penyaluran PKH Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru	51
4.2.2	Hambatan-hambatan dalam Penyaluran PKH pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Kenangan Baru.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		74
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77
DAFTAR LAMPIRAN		80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4.1 Denah Kelurahan Kenangan Baru.....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	41



DAFTAR TABEL

	Halaman
Daftar Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	28
Daftar Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	39
Daftar Tabel 4.2 Fasilitas Kesehatan	39
Daftar Tabel 4.3 Fasilitas Pendidikan	39
Daftar Tabel 4.4 Penerima PKH Tahun 2022	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam menjalankan roda pemerintahan aparatur pemerintahan merupakan alat, orang/pegawai negeri, instansi maupun badan pemerintahan yang mempunyai peran atau tugas untuk melayani sebagai bentuk abdi kepada negara dan abdi kepada masyarakat. Peran aparatur pada sektor pemerintahan mencakup bidang tugas yang luas dan melibatkan bentuk organisasi yang berskala besar dengan jumlah personil yang banyak untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan pembangunan. Dilihat dari tingkat terendah di pemerintahan yaitu pada kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat di Daerah Kabupaten/Daerah Kota di bawah Kecamatan (PPRI Nomor 73 Tahun 2005). Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS), Kelurahan juga berada di wilayah perkotaan. Kelurahan memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah dibantu oleh para perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan diisi dari PNS yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota atas usul camat. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretris kelurahan, seksi-seksi dan jabatan fungsional.

Jika dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat, kinerja yang optimal dari aparatur pemerintahan merupakan harapan setiap masyarakat terutama pada tingkat terendah yaitu di kelurahan. Kinerja merupakan suatu gambaran kualitas

pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja pegawai memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan organisasi. Agar tujuan organisasi dapat tercapai tentu saja tidak terlepas dari sumberdaya yang dikerjakan oleh pegawai atau aparatur yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dalam suatu organisasi publik, organisasi yang memiliki kinerja yang optimal maka tingkat pencapaian tujuan organisasinya juga semakin tinggi. Pengukuran kinerja pada suatu organisasi dilihat pada tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian tentunya dibutuhkan penilaian kinerja. Menurut Siagian dalam Junianto, dkk (2020) mengemukakan “penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi berupaya memperoleh informasi yang sangat akurat tentang kinerja para pegawainya”.

Kinerja pegawai yang sangat mumpuni pada suatu organisasi pemerintahan sangatlah diperlukan seperti di Kelurahan Kenangan Baru, merupakan salah satu unsur dalam pencapaian tujuan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan mencerminkan kesadaran dan etika baik yang di dasarkan kepada peraturan yang berlaku serta pengaruhnya seorang pemimpin di dalam organisasi tersebut.

Syukuri dalam Widiati (2021) menyatakan bahwa ada 4 syarat untuk mendapatkan kinerja yang optimal yaitu:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang layak/sesuai, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang didukung oleh sikap spiritual dan moral, loyalitas dan komitmen kepemimpinan, akan sangat membantu tercapainya kinerja daerah yang optimal.

2. Melakukan rekrutmen untuk menarik karyawan yang berkualitas membutuhkan mekanisme dan proses rekrutmen yang terorganisir dengan baik dan benar.
3. Melakukan pembinaan yang tepat untuk meningkatkan kinerja memerlukan pengembangan upaya peningkatan kapasitas secara terencana dan berkelanjutan.
4. Melakukan pengawasan pada masyarakat perlu dilakukan dan terus ditingkatkan melalui perwakilan nasional dan secara langsung melalui media massa dan masyarakat.

Kemiskinan merupakan suatu hal masalah sosial yang bersifat mendunia. Sehingga kemiskinan dapat dikatakan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat (Haughton dan Khandker 2012:2). Dalam hal kemiskinan pemerintah meyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial untuk membantu masyarakat dalam melanjutkan hidupnya, salah satu bantuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Permensos RI No 1 Tahun 2018 tentang PKH). Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan basis data terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH

dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajiban disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

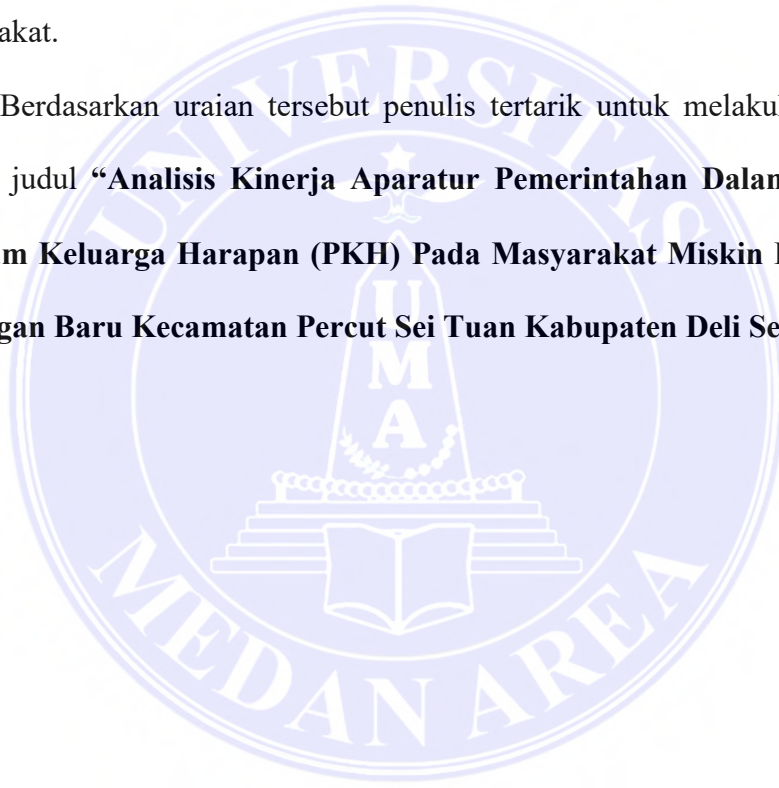
Beberapa Kriteria komponen PKH terdiri dari:

1. Kriteria komponen kesehatan yaitu:
 - a. Ibu hamil/menyusui
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan yaitu:
 - a. Anak SD/MI atau sederajat
 - b. Anak SMP/MTs atau sederajat
 - c. Anak SMA/MA atau sederaja
 - d. Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial yaitu:
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun)
 - b. Penyandang disabilitas berat.

Program ini diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang menjadi prioritas utama telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah diimplementasikan, namun demikian hasil belum optimal, ditandai dengan masih adanya masyarakat miskin

yang layak mendapat program bantuan tersebut namun tidak menerima jenis bantuan apapun dari pihak pemerintah, ada juga ditemukan yang telah menerima bantuan PKH ini namun terdapat kendala seperti dana bantuan yang belum dicairkan tanpa alasan tertentu, dan juga data-data masyarakat KPM yang tidak sesuai alamat penerima, ini ditemukan melalui penelitian di Kelurahan Kenangan Baru. Melihat adanya permasalahan yang ada di Kelurahan tidak terlepas dari kinerja aparatur pemerintah yang belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Kenangan Baru Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi bagi ilmu pengetahuan tentang Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis

Menurut Jogiyanto (2005:129) Analisis sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Analisis juga dikatakan suatu hal yang dilakukan untuk memahami secara cermat suatu objek untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Daryanto dalam Muda dan Batubara (2019:5) “Analisis adalah penyelidikan atau penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”. Dengan demikian proses analisis memiliki langkah yang panjang, yang dimulai dari para penelitian atau tinjauan awal sehingga memperoleh hasil yang sesungguhnya. Orang yang melakukan analisis biasanya disebut dengan Penganalisis, sedangkan proses perbuatan dan cara melakukan Analisis disebut dengan Penganalisan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis merupakan suatu kegiatan untuk menemukan suatu temuan baru terhadap objek yang akan diteliti dan diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tersebut.

2.2 Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Menurut Mangkunegara (2005:67) “Kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Cara mengatakan kinerja yaitu dengan cara berdayaguna prestasi dan hasil. Sedangkan menurut Simanjuntak (2005:221) “Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu”. Kinerja perusahaan tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.2.2 Pengukuran Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai dapat diukur sesuai dengan kepentingan perusahaan dan mempertimbangkan pegawai yang dinilainya. Beberapa dimensi pengukuran kinerja menurut Mondy, Noe dan Premeaux dalam Priansa (2014:271) yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kuantitas pekerjaan (*quantity of work*).

Kuantitas pekerjaan meliputi jumlah pekerjaan dan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam jangka waktu tertentu.

2. Kualitas pekerjaan (*quality of work*).

Kualitas pekerjaan mengacu pada pertimbangan ketelitian, ketepatan, kebersihan, dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan perusahaan.

3. Kemandirian (*dependability*)

Kemandirian merupakan pertimbangan tingkat kemampuan seorang karyawan untuk bekerja secara mandiri dan mendukung tugas dengan bantuan minimal dari orang lain. Kemandirian juga mewakili komitmen karyawan.

4. Inisiatif (*initiative*)

Inisiatif mengacu pada pertimbangan kemandirian, keluwesan berpikir, dan kemauan untuk bertanggung jawab.

5. Adaptabilitas (*adaptability*)

Adaptabilitas mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi, dengan mempertimbangkan kemampuan untuk menanggapi perubahan kebutuhan dan kondisi.

6. Kerjasama (*cooperation*)

Kerjasama mengacu pada melihat kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain.

2.2.3 Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja

Adapun hal yang mempengaruhi kinerja menurut Simanjutak (2005) yaitu:

1. Kualitas dan kemampuan pegawai, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan atau pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap dan mental.

2. Sarana pendukung, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan kerja seperti keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas produksi dan teknologi. Adapun hal yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan yaitu upah/gaji, jaminan sosial dan jaminan kerja.
3. Suprasarana, yaitu hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan pengelolaan hubungan industrial dalam ketenagakerjaan.

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :

1. Kemampuan individual

Mencakup bakat, minat dan faktor kepribadian. Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, pemahaman, kemampuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis. Dengan demikian kemungkinan, kemungkinan seorang pegawai mempunyai kinerja yang baik jika memiliki tingkat keterampilan yang baik.

2. Usaha yang dicurahkan

Usaha yang dicurahkan oleh pegawai adalah ketika bekerja, kehadiran, dan motivasinya. Tingkat usahanya merupakan gambaran motivasi yang diperlihatkan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Walaupun pegawai memiliki tingkat keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan, tidak akan bekerja dengan baik jika hanya sedikit upaya. Tingkat keterampilan merupakan cerminan dari apa yang dilakukan, sedangkan tingkat upaya merupakan cerminan apa yang dilakukan.

3. Lingkungan organisasional

Dalam lingkungan organisasional, perusahaan menyediakan fasilitas bagi pegawai meliputi pelatihan dan pengembangan, peralatan, teknologi dan manajemen.

2.2.4 Meningkatkan Kinerja Aparatur

Dalam suatu organisasi peningkatan tingkat keberhasilan pegawai harus ditingkatkan. Tyson dan Jackson (2010) menyatakan, “meningkatkan kinerja merupakan konsep sederhana tetapi penting. Konsep tersebut didasarkan pada ide bahwa sebuah tim akan meningkat dengan cepat dan terus-menerus dengan cara meninjau keberhasilan serta kegagalannya”. Ada 4 (empat) tahap dalam meningkatkan kinerja Tyson dan Jackson (2010) memulai dan mengerjakan tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh kelompok dan membiarkan tim mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan serta tugas-tugas yang merintangi keberhasilan.

1. Memilih faktor-faktor keberhasilan yang praktis dan membuang faktor-faktor yang tidak mempunyai nilai.
2. Menyetujui bagaimana membuat faktor-faktor tersebut dengan tepat dan menyingkirkan jalan lain.
3. Menganalisis faktor-faktor tersebut pada tingkat kelompok dan tingkat individu.

2.3 Aparatur Pemerintahan

Konsep aparatur pemerintahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aparat diartikan sebagai badan pemerintahan, instansi pemerintah, pegawai negeri dan alat negara, aparatur negara. Sedangkan aparatur negara merupakan alat kelengkapan negara yang termasuk pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Setiawan (2004 : 39) Aparatur pemerintahan di definisikan sebagai “pekerja yang digaji pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Aparatur pemerintahan merupakan orang yang melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas dari pemerintah dan orang tersebut digaji berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Di dalam melaksanakan tugasnya orang tersebut haruslah menanamkan rasa tanggung jawab supaya kualitas kinerjanya dapat optimal dan masyarakat akan merasakan langsung dampaknya.

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) biasanya dikenal dengan sebutan Program Keluarga Harapan (PKH) atau *Conditional Cash Transfer* (CCT) merupakan pemberian bantuan berupa tunai yang bersyarat pertama yang ada di Indonesia. Tujuan dari bantuan ini yaitu untuk membantu meningkatkan taraf hidup serta kebutuhan Keluarga Sangat Miskin (KSM) namun dengan syarat

mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi keluarga sangat miskin. Melalui pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat merubah perilaku serta mendukung terjadinya kesejahteraan sosial. Masyarakat Penerima Manfaat (KPM) PKH memiliki kewajiban di bidang kesehatan yaitu melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya (Kemensos RI, 2015: 12).

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH):

- A. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- B. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- C. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- D. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- E. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Jumlah dana bantuan PKH yaitu sebagai berikut:

- a. Komponen kesehatan:

- 1) Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun
- 2) Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun.

b. Komponen pendidikan:

- 1) Anak SD/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun
- 2) Anak SMP/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun
- 3) Anak SMA/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun.

c. Penyandang disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp2,4 juta per tahun.

Pendaftaran PKH dapat dilakukan secara Online melalui link kemensos.go.id namun dapat juga mendaftarkan diri ke Kelurahan/Desa dimana masyarakat itu berada, alur pendaftarannya adalah:

1. Keluarga kurang mampu mendaftarkan diri ke Kepala Desa atau Lurah, dengan membawa KTP dan KK
2. Kemudian Kepala Desa atau Lurah menyampaikan data pendaftaran ke Bupati atau Walikota melalui Camat
3. Adanya peran Dinas Sosial, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga
4. Bupati atau Wali Kota yang mendapatkan data tersebut, kemudian menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke Menteri melalui Gubernur
5. Kemudian data tersebut oleh Kementerian Sosial akan menetapkan di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

6. Pemanfaatan data oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Daerah yang selanjutnya untuk program bantuan sosial dan pemberdayaan.

Ketika data keluarga miskin tersebut masuk ke DTKS artinya keluarga miskin tersebut masuk dalam antrian dan bisa mendapatkan bantuan PKH, artinya jika masyarakat miskin tersebut tidak termasuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maka masyarakat tidak akan bisa menerima bantuan PKH.

Alur pelaksanaan PKH dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan, yaitu menentukan lokasi dan jumlah KPM dari DTKS
2. Pertemuan awal dan validasi, pendamping sosial melakukan pertemuan awal dan melakukan validasi kecocokan data, dan menjelaskan tujuan PKH, hak dan kewajiban KPM, mekanisme pengaduan, sanksi bagi KPM yang tidak memenuhi komitmen, serta pembukaan rekening Bank untuk akses penyakuran dana.
3. Penetapan KPM PKH, dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sesuai kriteria dengan validasi dan pemuktahiran data.
4. Penyaluran Bantuan Sosial PKH, dana non tunai disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan yang sebelumnya telah dibuka. Proses penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan melalui Bank penyalur dan bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatann pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, modal usaha agar sesuai dengan tujuan PKH.
5. Pemuktahiran data dilakukan oleh pendamping ketika menemukan perubahan situasi dan kondisi KPM yang langsung dilihat oleh Pendamping setiap melaksanakan kegiatan bulanan.

6. Verifikasi Komitmen, yaitu memastikan KPM terdaftar hadir dan mengakses layanan dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
7. Pendampingan, untuk mempercepat tercapainya tujuan PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
 - a) Melakukan pertemuan kelompok, pertemuan kelompok merupakan kegiatan yang divasilitasi oleh pendamping sosial untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administratif dan edukatif dengan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH serta akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan KPM PKH.
 - b) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan pemahaman mengenai pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku KPM PKH.
8. Transformasi kepesertaan, kepesertaan KPM selama enam tahun setelah itu diharapkan perubahan perilaku terhadap bidang yang telah ditentukan. Kegiatan resertifikasi kembali dilakukan pendataan ulang dan evaluasi terkait status sosial ekonominya selama mendapat bantuan dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun kelima ketika akan berakhirnya kepesertaan selama enam tahun KPM akan dilakukan resertifikasi hasil ini akan menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu graduasi dan transisi.
 - a) Transisi adalah peserta yang konsisinya masih memenuhi syarat PKH pada

masa ini diberikan waktu 3 tahun dan wajib memenuhi kewajiban KPM PKH serta dipersiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya.

- b) Graduasi dibagi menjadi dua yaitu graduasi sejahtera mandiri yaitu berakhirnya kepesertaan KPM yang melakukan pengunduran diri secara mandiri mengingat peserta tersebut sudah merasakan peningkatan kemampuan dan merasa sudah mampu tanpa bantuan dari pemerintah lagi, kemudian graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena sudah tidak terdaftar lagi di DTKS dan sudah tidak memiliki kriteria untuk mendapatkan bantuan PKH itu lagi.

2.5 Kemiskinan

2.5.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Bank dunia (2000) dalam Jonathan Houghton dan Shahidur R. Khandker (2012:2) “Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan”. Pengertian ini menimbulkan pertanyaan tentang kesejahteraan, sehingga orang atau masyarakat miskin dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk dapat dikatakan minimal kategori mampu atau sejahtera. Dalam hal ini pandangan bahwa kemiskinan dilihat dan dikaitkan dengan masalah keuangan.

Berbagai pendekatan yang digunakan salah satunya ialah dengan menganggap kesejahteraan sebagai penguasaan atas barang secara umum, sehingga masyarakat dapat menjadi jauh lebih baik dan lebih layak bila mereka memiliki penguasaan yang lebih besar atas sumberdaya. Kemiskinan merupakan kekurangan perlengkapan atas barang yang dimiliki dan pelayanan-pelayanan

yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mendapatkan atau memiliki barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Suyanto 2001:29). Berbagai pandangan ahli, kemiskinan seringkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat tentang hal ini, belum diakui atau kurang mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dihadapi keluarga miskin.

Kemiskinan sesungguhnya bukan hanya kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu kemiskinan juga menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

2.5.2 Ukuran Kemiskinan

Cara untuk mengukur kemiskinan adalah menentukan indikator kesejahteraan, seperti pendapatan atau konsumsi per kapita. Berbagai Informasi tentang kesejahteraan diperoleh dari data survei. Adapun Rancangan survei yang baik merupakan hal penting. Walaupun beberapa survei menggunakan sampel acak sederhana, sebagian besar survei menggunakan pengambilan sampel acak bertingkat (*stratified random sampling*). Metode ini memerlukan penggunaan bobot-bobot pengambilan sampel dalam analisis selanjutnya.

Menurut Sajogyo dalam Agus (2014) cara merinci kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Penekanan tiga garis kemiskinan dengan menggabungkan konsep ambang batas kecukupan pada nilai pangan.
2. Mengaitkan pengeluaran pada rumah tangga dengan sebrapa besar cukupnya nilai pangan.

Ellis (Agus, 2014:14) menyatakan persoalan yang ada pada kemiskinan bukanlah besar kecilnya ukuran tetapi ada aspek atau dimensi yang ada pada kemiskinan, dimensi tersebut sebagai berikut :

- a. Kemiskinan dari dimensi ekonomi atau materi, aspek ini tercermin dalam berbagai kebutuhan paling mendasar manusia yakni sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Aspek atau dimensi ini bisa diukur dalam rupiah, tetapi harga tersebut dapat berubah setiap tahunnya tergantung tingkat inflasi rupiah tersebut.
- b. Kemiskinan dari dimensi Sosial Budaya, Dimensi Budaya dalam kemiskinan dapat ditunjukkan melalui pelembagaan nilai-nilai seperti ketidakpedulian, apolitisme, fatalisme dan ketidakberdayaan. Dengan hal itu, kemiskinan dapat dikatakan pengikisan budaya sehingga jika budaya ini belum mampu di dihilangkan maka kemiskinan ekonomi akan sulit di atasi.
- c. Kemiskian dengan dimensi struktural atau politik, kemiskinan ini sama halnya dengan kemiskinan ekonomi. Pada dasarnya masyarakat miskin (kemiskinan struktural dan politik) karena mereka tidak memiliki akses untuk berpartisipasi di bidang politik, dan tidak mempunyai kekuatan politik, dengan demikian mereka menempati struktur sosial terendah.

Banyak pendapat yang menekankan bahwa mereka yang miskin baik struktural maupun politik pasti akan mengakibatkan kemiskinan ekonomi (material). Dengan demikian hambatan struktural dan politik juga harus diatasi agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif.

Dari dimensi kemiskinan ini memperjelas bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan implikasi, tetapi dengan kerjasama juga bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang bersifat non-ekonomi. Dalam hal ini akan mengalami perubahan pembangunan nasional yang tidak hanya mengupayakan pertumbuhan ekonomi namun juga harus membangun manusia yang lebih berkualitas di bidang sosial budaya dan politik.

2.6 Kelurahan Kenangan Baru

Menurut PPRI (Praturan Pemerintah Republik Indonesia) Nomor 73 Tahun 2005 mengenai pengertian Kelurahan, “Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat di Daerah Kabupaten/Daerah Kota di bawah Kecamatan”. Kelurahan juga merupakan perangkat di Kecamatan, pimpinan pada kelurahan disebut Kepala Kelurahan. Dalam pembentukan kelurahan ditentukan dari peraturan daerah, Camat mengusulkan agar mengangkat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang tentunya sudah memenuhi syarat oleh Bupati/Walikota. Lurah menerima pendelegasian kekuasaan di pemerintahan dari Bupati/Walikota. Selain tugas tersebut, tugas Lurah juga mengatur pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan pada masyarakat, sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Lurah didalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab pada Bupati/walikota atas perantaraan dari Camat.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, kedudukan kelurahan mempunyai peran terhadap negara yaitu sebagai:

- a. Data, informasi, mobilitas, pengawasan serta bimbingan.
- b. Tempat untuk pengamalan penanaman nilai-nilai Pancasila.
- c. Wadah untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa gotong royong dalam jiwa masyarakat.
- d. Pembinaan keterlibatan masyarakat di berbagai bidang.
- e. Pembinaan ketertiban dan persatuan nasional dalam melancarkan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pada penelitian ini lokasi penelitian adalah Kantor Kelurahan Kenangan Baru, Kelurahan Kenangan Baru merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat dikecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 69, 16 Ha. Wilayah Kelurahan Kenangan Baru terdiri dari 14 lingkungan, 75 RT dan 19 RW. Topografi Kelurahan Kenangan Baru terletak pada daratan tinggi. Ketinggian tanah dari permukaan air laut 2 meter. Kenangan Baru memiliki batas wilayah:

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kenangan dan Kecamatan Medan Tembung.
2. Di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kenangan dan Kecamatan Medan Denai.
3. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Denai.
4. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Denai.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh bahan perbandingan serta acuan dan rujukan untuk karya ilmiah yang dibuat oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu penulis cantumkan dalam tinjauan pustaka ini antara lain:

1. Penelitian Ery Kusnadi, Imam Yudhi Prastya, dan Novi Winarti dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjudul “Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun” Tahun 2022. Metode penelitian ini adalah metode Kualitatif, dan menggunakan teori penilaian kinerja menurut Ripley dilakukan dengan observasi di lapangan dan melalui wawancara maka hasil dari penelitian tersebut hasil dari wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat . Dimana masyarakat juga berharap petugas mampu memberikan solusi dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat di kelurahan Alai Kecamatan Ungar.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Ery Kusnadi, Imam Yudhi Prastya, dan Novi Winarti dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melihat bagaimana kinerja dalam penyaluran PKH, metode penelitian dan instansi yang sama namun menggunakan teori yang berbeda.

2. Penelitian Irvan Junianto, Isabella dan Novia Kencana dari Universitas Indo Global Mandiri yang berjudul “Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim” Tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil analisis dari penelitian tersebut dengan melakukan observasi

dan diperkuat dengan hasil wawancara dan kuesioner maka dapat diketahui bahwa kinerja Pegawai di Kantor Lurah Gelumbang belum berjalan efektif, ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam penelitian ini belum baik. Hal tersebut disebabkan karena kurang disiplinnya pegawai menjalankan pelayanan didalam pekerjaan kehadiran dan kepulangan kerja belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu permasalahan yang ada di Kantor Kelurahan Gelumbang belum sepenuhnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan observasi penulis bahwa Penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat serta fasilitas di kantor kurang memadai sehingga kemungkinan untuk terjadi kendala dalam melakukan pelayanan.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan Irvan Junianto, Isabella dan Novia Kencana dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana menganalisis kinerja aparatur pemerintahan tersebut yang juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan serta instansi tempat penelitian yang sama yaitu pada Kantor Kelurahan.

3. Penelitian Maulida Rachma (2022), Yusuf Hidayat, Laila Azkia dari Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul “Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang di gunakan adalah Teori Subarsono tahun 2008 mengidentifikasi karakteristik masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hambatan Pelaksanan Program Keluarga Harapan (PKH)

dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan, masih terdapat beberapa hambatan internal dan eksternal yang belum terselesaikan.

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyaluran PKH, dengan menggunakan metode yang sama yaitu Kualitatif namun berbeda dengan teori yang akan digunakan.

4. Penelitian yang dilakukan Yogi Ade Supratman pada tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah baik, walau masih terdapat kendala seperti sulitnya mengajukan permintaan penambahan jumlah kuota PKH. Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Desa Tapung Lestari sudah transfaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan melakukan musyawarah bersama.

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan peneliti selanjutnya yaitu melihat bagaimana kinerja aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan PKH, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Kualitatif.

5. Penelitian yang dilakukan Kusman Yuhana dan Titin Kartini dari Universitas Subang dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan

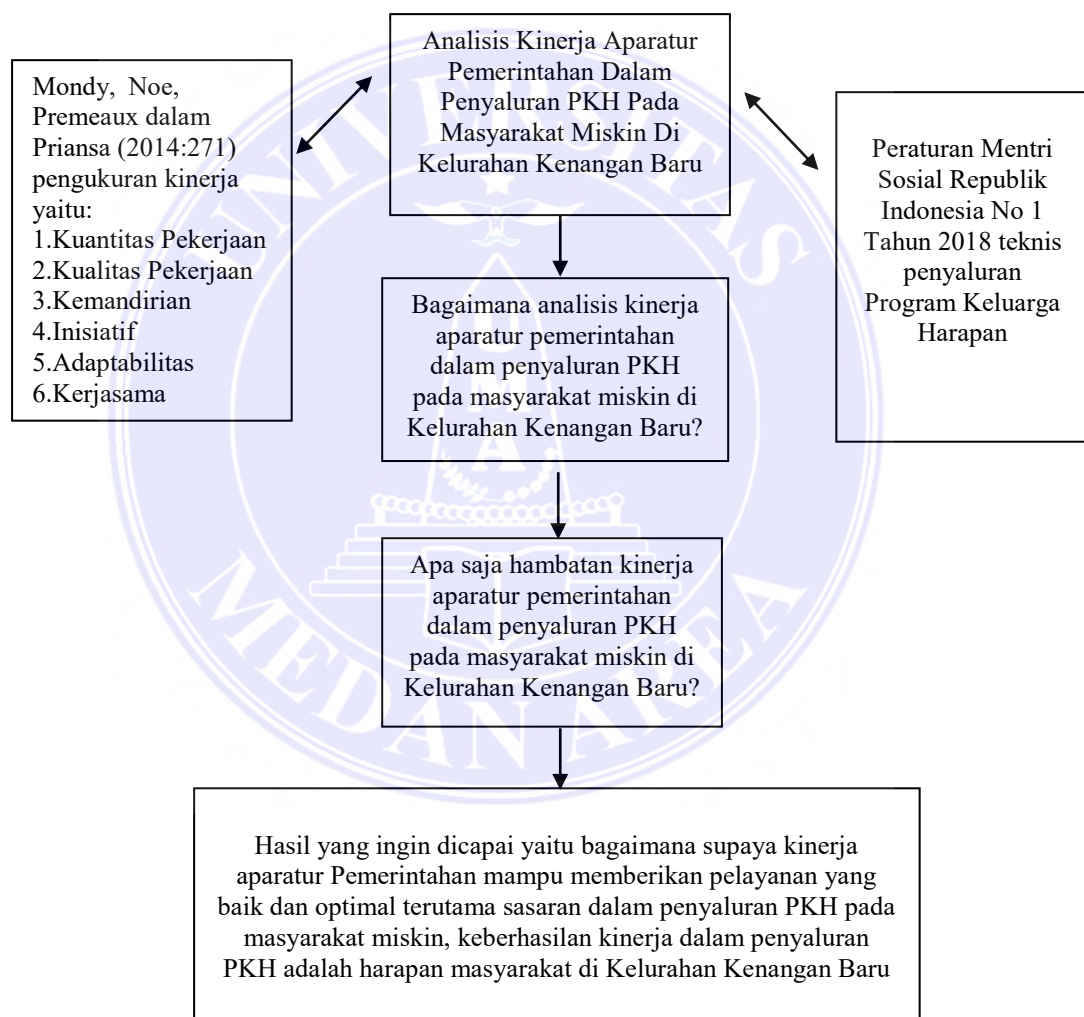
(PKH) di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang” tahun 2019, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan Implementasi PKH di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang belum optimal. Hal ini berarti masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam mekanisme maupun prosedur yang ada, dilihat dari proses kegiatan pertemuan awal, validasi, pembentukan kelompok, pemuhtahiran data, verifikasi komitmen peserta dan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan. Faktor penghambat implementasi PKH di Kelurahan Cigadung meliputi kendala sumber data yang kurang akurat, sering kali terjadi kecemburuan sosial antara KPM dan masyarakat setempat, rendahnya daya tangkap dari KPM berlatar belakang pendidikan (SD/SMP kurang memahami PKH dan dalam penggunaan dana PKH oleh KPM kerap digunakan diluar ketentuan. Untuk jangka panjang belum bisa merubah pola pikir dan perilaku RTSM secara signifikan.

Dalam hal ini persamaan penelitian adalah terkait penerapan PKH di kelurahan dengan dengan sasaran masyarakat sangat miskin dan dengan metode penelitian yang sama yaitu Kalitatif namun berbeda dengan teori dan metode yang digunakan peneliti adalah Analisis. Diharapkan hasil yang akan peneliti lakukan dalam penelitian mengenai kinerja aparatur pemerintahan dalam penyaluran PKH pada masyarakat miskin menghasilkan sisi positif bagi pembaca dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengukuran kualitas kerja.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposi yang yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya (Hardani,, dkk, 2020:321).

Adapun kerangka pemikiran dapat di jelaskan melalui bagan kerangka berpikir:



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Dari bagan tersebut dapat dijabarkan kerangka pemikiran sebagai bentuk penjelasan rinci, Peneliti mengangkat judul Skripsi yaitu “Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran PKH Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Peneliti menggunakan Teori dari Mondy, Noe, Premeaux dalam Priansa (2014:271) untuk acuan penelitian yaitu mengenai pengukuran kinerja ada Enam (6): yang pertama; yaitu bagaimana Kuantitas kinerja aparatur dalam menyalurkan PKH di Kelurahan Kenangan Baru, Kedua; bagaimana Kualitas pekerjaannya dalam penyaluran PKH tersebut, Ketiga; apakah terdapat Kemandirian aparatur pemerintahan di kelurahan Kenangan Baru dalam melakukan penyaluran PKH, Keempat; Inisiatif pegawai untuk menerima tanggung jawab dalam menyalurkan PKH, Kelima; Adaptabilitas yaitu kemampuan pegawai untuk beradaptasi terhadap kebutuhan sesuai kondisi, Keenam; Kerjasama yaitu kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan atasan, sesama pegawai, maupun pendamping PKH dalam penyaluran PKH di Kelurahan Kenangan Baru.

Regulasi dalam kerangka pemikiran peneliti mengambil acuan Pertama dari Permensos RI No 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan melalui peraturan menteri sosial ini peneliti dapat menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan PKH.

Dari ke enam Teori dan Regulasi pada Kerangka Pemikiran ini diharapkan peneliti akan mampu mengembangkan kajian penelitian dan menjawab Rumusan Masalah pada penelitian di Kelurahan Kenangan Baru.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Dilaksanakan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Kenangan Baru. Penelitian ini dilakukan karena peneliti telah melakukan pra penelitian dan mengamati secara langsung proses kinerja di Kelurahan Kenangan Baru, peneliti mengamati adanya kekurangan dalam pelayanan seperti lemahnya empati aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan. Lokasi penelitian ini tepatnya dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berada di Jln. Cucak Rawa II No.1. Peneliti melaksanakan waktu penelitian pada bulan April 2022, harapan peneliti didalam melaksanakan penelitian tersebut mendapatkan hasil dan informasi yang maksimal sehingga berguna bagi kelanjutan tugas akhir.

Daftar Tabel 3.1 Waktu Penelitian

N0	Uraian Kegiatan	Okt 2021	Des 2021	Jan 2021	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agus 2022	Sep 2022
1	Pengajuan Judul											
2	Bimbingan Proposal											
3	Seminar Proposal											

4	Data/ Penelitian										
5	Seminar Hasil										
6	Perbaikan Skripsi										
7	Sidang										

3.2 Jenis dan Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moeleong, 2006:6). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintahan di Kelurahan Kelurahan Kenangan Baru dalam penyaluran PKH pada masyarakat miskin. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan dikumpulkan dari berbagai data studi kasus, wawancara, pengamatan pribadi serta teks hasil pengamatan.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan fenomena aktual dan faktual yang terjadi di lapangan, yang tidak hanya mengumpulkan data saja tetapi juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan, dengan demikian maka penelitian ini akan menjawab sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dalam melihat bagaimana Kinerja Aparatur Pemerintahan di Kelurahan Kenangan Baru dalam penyaluran PKH pada

masyarakat miskin.

Menurut Sugiyono (2018:2) “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Penelitian rasional adalah penelitian yang menggunakan teori.

Melalui metode Kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tulisan, ucapan dan perilaku yang ditemui pada saat pengamatan dari suatu individu, kelompok/komunitas masyarakat dan organisasi dalam konteks tertentu sehingga memberikan pandangan penelitian yang lengkap, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsionalisasi organisasi, kegiatan sosial dengan menggunakan prosedur statistik atau cara pengukuran lainnya.

Melalui penelitian kualitatif ini maka peneliti menggambarkan bagaimana permasalahan yang berhubungan dengan “Analisis Kinerja aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran PKH Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru”.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang mampu memberikan informasi secara langsung. Informan penelitian merupakan orang, objek maupun suatu organisasi dan sifatnya dapat diteliti, (Sukandarumidi, 2002:65) sedangkan Afrizal (2016:139) mengatakan bahwa informan penelitian merupakan seseorang yang dapat memberikan suatu informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau

memberikan informasi mengenai kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara secara keseluruhan. Dalam penelitian kualitatif informan penelitian dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Informan kunci

Menurut Afrizal (2016:139) informan kunci merupakan seseorang yang mengetahui seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala lurah Kenangan Baru Bapak Rizal Arifin, S.STP.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) informan utama merupakan seseorang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan utama pada penelitian ini adalah Pendamping Sosial PKH di kelurahan Kenangan Baru yaitu Ibu Windasari.

c. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan merupakan seseorang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis serta pembahasan dalam penelitian Kualitatif. Informan tambahan pada penelitian ini adalah Sekretaris Lurah dan masyarakat penerima PKH yaitu, Ibu Jojor, Ibu Agus Susanti dan Ibu Dian Chandra Dewi di kelurahan Kenangan Baru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.1.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2018:203) “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”. Riyanto (2010:96) juga mengemukakan pendapatnya “observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan, Observasi yaitu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis dengan melakukan pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana kinerja aparatur pemerintahan dalam penyaluran PKH pada masyarakat miskin tepatnya di Kelurahan Kenangan Baru.

3.1.2 Wawancara

Menurut Esterbrg (Sugiyono 2018:304) “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk melakukan tanya jawab dengan mencari informasi yang di butuhkan, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Sedangkan menurut Stainback (Sugiyono 2018:305) bahwa “dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak ditemukan melalui informasi”. Maka dapat disimpulkan bahwa Wawancara merupakan percakapan atau Tanya jawab langsung ke narasumber dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian akan dijawab langsung oleh narasumber. Teknik wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada responden dan informan

yang telah ditentukan yaitu dengan tanya jawab langsung kepada Lurah, pegawai/aparatur dan masyarakat di Kelurahan Kenangan Baru untuk mendapatkan informasi maupun data yang valid dari narasumber dalam melengkapi data yang dibutuhkan peneliti.

3.1.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:319) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumentasi yaitu peristiwa masa lalu yang disajikan dalam bentuk data atau tulisan dan gambar. Dokumen dalam bentuk tulisan atau data tersebut seperti sejarah kehidupan, data harian, kebijakan/peraturan dan biografi. Dokumen dalam bentuk gambar seperti gambar hidup, foto dan sketsa. Dokumen dari penelitian ilmiah termasuk karya seni berupa gambar, patung, dan film sehingga memperoleh dokumen, arsip dari instansi yang akan diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2018:319),

“Analisis data didefinisikan sebagai data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”.

Artinya analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari

dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman (2010:255) meliputi :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Dengan mengumpulkan berbagai informasi melalui pengumpulan data maka peneliti dapat melihat bagaimana kinerja aparatur pemerintahan serta apa saja hambatan hambatannya dalam penyalurann PKH yang ada di Kelurahan Kenangan Baru.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian pada tahap mereduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dengan merangkum dan memilih pokok yang penting pada saat penelitian maka peneliti mampu menggambarkan bagaimana tema dan pola yang akan peneliti lakukan untuk mendapat informasi yang lebih tentang bagaimana kinerja aparatur dan apa saja hambatannya dalam penyaluran PKH di Kelurahan Kenangan Baru.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, data disajikan secara tertulis berdasarkan kenyataan yang faktual dan saling berkaitan, dan penyajian data ini dimaksudkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada kinerja aparatur pemerintahan serta apa saja hambatannya dalam menyalurkan PKH di Kelurahan Kenangan Baru.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Proses menarik kesimpulan dari hasil pembahasan, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti dan diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir dan peneliti telah memiliki data yang cukup untuk menjawab semua yang peneliti butuhkan seperti mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintahan dalam penyalurn PKH serta mengetahui hambatan yang terjadi dalam penyaluran tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kenangan Baru mengenai penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat miskin di Kelurahan Kenangan Baru peneliti menarik kesimpulan:

Hasil penelitian melalui metode analisis data dan pengamatan di Kelurahan Kenangan Baru dengan menggunakan Teori pengukuran Kinerja yaitu meliputi Kuantitas pekerjaan; kuantitas dalam penyaluran PKH ini sudah terlaksana dengan baik ditandai dengan berjalannya bantuan PKH, adanya data penerima bantuan PKH, dan input data masyarakat miskin oleh kelurahan sebagai calon penerima bantuan. Kualitas pekerjaan; kuantitas pekerjaan dalam penyaluran PKH belum terlaksana dengan baik. Tidak tepatnya sasaran penerima bantuan karena adanya masyarakat yang dikatakan mampu namun menerima bantuan PKH, kemudian adanya dana bantuan yang tidak tersalurkan. Kemandirian; kemandirian aparatur pemerintahan dalam penyaluran PKH belum berjalan baik dikarenakan ketika masyarakat melakukan pendaftaran dan pengurusan terkait bantuan PKH aparatur di Kelurahan terkadang tidak mampu menyelesaikan dengan cepat terkait urusan masyarakat tersebut, aparatur di kelurahan juga akan mengabaikan tugas yang bukan menjadi bagiannya. Inisiatif; inisiatif aparatur pemerintahan dalam penyaluran PKH sudah berjalan baik, dalam hal ini pendamping yang bertugas di Kelurahan Kanangan Baru melakukan pendampingan pada KPM dan melakukan kegiatan P2K2. Pendamping PKH juga

mengunjungi rumah KPM jika ada data yang salah dan perlu di registrasi ulang. Adaptasi; dalam hal ini aparatur pemerintahan mampu beradaptasi dengan baik ditandai dengan pendamping PKH yang mampu beradaptasi dengan KPM ketika kegiatan P2K2 dan juga mampu beradaptasi ketika terjadinya pergantian KPM maupun ketika adanya sistem kerja yang berubah. Kerjasama; dalam hal kerjasama oleh aparatur pemerintahan yang bertugas dalam penyaluran PKH di Kelurahan Kenangan Baru belum berjalan dengan baik, ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan kerjasama antara aparatur di Kelurahan dengan Pendamping PKH. Kurangnya komunikasi mengakibatkan aduan masyarakat yang tidak bisa di tanggapi oleh aparatur di Kelurahan dan hanya diserahkan kepada pendamping PKH. Visi, Misi dan Motto yang ada di kantor kelurahan Kenangan Baru yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih adanya tugas dalam hal ini pelayanan penyaluran PKH yang belum berjalan baik, masih perlunya pengawasan dan perbaikan.

Hambatan aparatur pemerintahan dalam penyaluran PKH pada masyarakat ditemukan adanya ketidaksinkronan data penerima dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, kurangnya inisiatif dari masyarakat KPM itu sendiri dalam menghadiri kegiatan P2K2 setiap bulannya yang sebenarnya memiliki sanksi ketika tidak mengikuti kegiatan. KPM juga terkesan lebih mementingkan pekerjaan daripada mengikuti kegiatan P2K2, terbatasnya SDM yang menjadi pendamping PKH dan tidak memiliki rekan untuk membantu kegiatan dalam menjalankan tugasnya, pendamping hanya 1 dan hanya dibantu oleh ketua kelompok yang dipilih dari KPM itu sendiri. Fasilitas yang kurang memadai juga

menjadi hambatan dalam kegiatan yang dilakukan seperti tidak adanya tempat khusus untuk melakukan kegiatan P2K2, tidak adanya komputer dan fasilitas penunjang kegiatan. Dana yang tidak tersalurkan juga menjadi faktor yang menjadi kendala bagi KPM yang mengakibatkan KPM malas untuk ikut kegiatan P2K2.

5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti mengenai kinerja aparatur pemerintahan pada penyaluran PKH ini yaitu:

1. Sebaiknya data-data yang di berikan oleh pihak Kelurahan ke DTKS adalah data terbaru yang selalu dilakukan pembaharuan pertahun agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran penyaluran.
2. Melakukan seleksi yang lebih akurat kepada penerima PKH.
3. Kerjasama antar pegawai kelurahan dengan pendamping PKH harus berjalan dengan baik agara tidak terjadi ketidak akuratan data yang ada.
4. Memperbaiki SDM agar lebih profesional dan mencukupi.
5. Meningkatkan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal, M.A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Agus, Sjafari. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hardani Hikmatul, Jumari Ustiawaty,.. (2020) . *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Haughton J, Shahidur R. Khandker. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haughton, Jonathan & Khandker, Shagidur, R. Khandker. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan; Handbook on Poverty & Inequality*. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development
- Jogiyanto, Hartono, MBA. Ph. D (2005), *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta : Andi
- Mangkunegara, Pangeran Adipati Arya. (2005). *Evaluasi kinerja SDM*. Tiga Serangkai.
- Mathis, Robert L., dan John Harold Jackson. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat
- Miles dan Humberman. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ALFABETA
- Moeleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mondy, R Wayne, Robert M and Shane R. Premeaux. (1999). *Human Resource Management*. Massachusetts, Allyn and Bacon.
- Muda, Indra, & Mashito, B., Batubara. (2019). *Analisis kebijakan publik*. Medan: Media Persada.
- Priansa, J.D. (2014). *Perencanaan & Pengembangan SDM*. Bandung: Alfabeta.
- Riyanto, Yatim. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC
- Salam, Dharma Setyawan. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.

- Simanjuntak, Payaman J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi kinerja. FE Universitas Indonesia, Jakarta.*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta CV.
- Sutrisno, Edy. (2010). *Budaya Organisasi.* Jakarta: Prendamedia Group.
- Tyson, Shaun, dan Jackson Tony (2010). *The Esense of Organization Behaviour.* Singapore: Pearson Education Asia Pte. Ltd

JURNAL, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Ery, K., Imam, Y. P., & Novi, W. (2022). *Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Junianto, I., Isabella, I., & Kencana, N. (2020). Analisis kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(1).
- Khumaini, Ayatullah. (2017). *Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Bantuas Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.* *Jurnal Paradigma (JP)*, 2(1), 26-35.
- Noerkaisar, Noni. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104.
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93-104.
- Riwandi, Hafid. (2017). *Pengaruh kecerdasan sosial dan motivasi kerja islami terhadap prestasi kerja karyawan di bank syariah di yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Safrijal., Basyah, Naszir., & Ali, Hasbi. (2016). Penerapan prinsip-prinsip good governance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 176-191.
- Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. *Journal of Vocational Behavior*, 80(3), 661-673. doi: 10.1016/j.jvb.2012.01.011
- Supratman, Y. A. (2019). *Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan*

Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, UMSU).

Suyanto, Bagong (2001). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (4), 25-42.

Widiati, Widiati. (2021). Analisis kinerja pegawai kantor desa indrasari kecamatan martapura kabupaten banjar. *As-siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 50-59.

Yesaya, Lede I Daga. (2019). *Analisis pengaruh kinerja karyawan, fasilitas bongkar muat dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna jasa tpks di pelabuhan tanjung emas semarang. Skripsi.*

Yuhana, K., & Kartini, T. (2019). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 63-78.

PERATURAN MENTERI DAN PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran Wawancara kepada Informan Kunci yaitu kepada Lurah Rizal

Arifin, S.STP :

1. Bagaimana peran aparatur kelurahan dalam Penyaluran PKH di kantor kelurahan Kenangan Baru?
2. Kapan diberlakukannya PKH di kelurahan Kenangan Baru, serta bagaimana tahapan penyaluran dananya apakah sesuai dengan waktu yang ditentukan?
3. Siapakah sasaran bantuan PKH ini dan bagaimana ketelitian dalam melihat masyarakat itu sendiri sesuai dengan kriterianya?
4. Bagaimana menurut bapak selaku lurah kemandirian pegawai dalam penyaluran PKH ini dalam hal menjalankan tugasnya masing-masing?
5. Bagaimana sikap inisiatif para aparatur pemerintahan dalam melakukan pekerjaan masing-masing serta bertanggung jawab dengan apa yang di kerjakan dan di tugaskan?
6. bagaimana sikap pegawai dalam beradaptasi ketika ada perubahan-perubahan dalam pekerjaannya?
7. Menurut bapak kendala dalam data data di DTKS apakah memang

menjadi hambatan besar untuk masyarakat miskin di kelurahan Kenangan Baru?

**Lampiran Wawancara kepada Informan Utama yaitu Ibu Windasari
Pendamping PKH:**

1. Berapa jumlah KPM di kelurahan Kenangan Baru serta bagaimana tugas ibu selaku pendamping PKH?
2. Bagaimana ibu selaku pendamping PKH dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada ibu terkait KPM dampingan ibu?
3. apa saja hal yang terdapat dalam kegiatan yang dilakukan setiap bulan kepada Pendamping PKH tersebut?
4. Bagaimana ibu selaku pendamping PKH menghadapi perubahan-perubahan dalam sistem kerja perpindahan lokasi dampingan, bagaimana ibu dalam beradaptasi dengan masyarakat KPM?
5. hal apa yang menjadi penghambat kinerja dalam penyaluran PKH pada masyarakat miskin di kelurahan Kenangan Baru?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kegiatan P2K2?
7. Bagaimana menurut ibu mengenai hambatan yang terjadi dalam Penyaluran PKH di kelurahan Kenangan Baru khususnya SDM yang ada sebagai aktor di lapangan?
8. Hal apa kemudian yang menjadi hambatan lainnya bu?
9. Bagaimana menurut itu tentang dana yang tidak trsalurkan atau dana yang macet kepada KPM bu?

Lampiran Wawancara kepada Informan Tambahan Sekretaris Lurah Bapak

Rajin Tarigan:

1. Bagaimana berjalannya penyaluran PKH di kelurahan Kenangan Baru?
2. apakah pekerjaan tersebut terselesaikan dengan waktu yang tepat, misalnya dalam pengurusan atau pendataan adanya masyarakat yang mendaftar sebagai PKH ke Kelurahan?
3. bagaimana sikap inisiatif para pegawai ketika ada masyarakat yang melakukan pengurusan pendaftaran diri untuk diajukan sebagai penerima bantuan PKH?
4. Bagaimana inisiatif pegawai di kelurahan ini untuk mengajukan masyarakat secara mandiri dengan data yang valid untuk menerima PKH bagi yang layak?
5. bagaimana adaptasi pegawai dalam menghadapi perubahan dalam sistem kerja ataupun dalam hal penyaluran PKH?
6. bagaimana kerjasama antara pendamping PKH dan pegawai di kelurahan dalam hal penyaluran PKH di kelurahan Kenangan Baru?
7. Menurut bapak apa hambatan yang terjadi ketika dana tidak cair yang berakibat dari data di DTKS kurang valid?

Lampiran Wawancara kepada Informan Tambahan KPM PKH Ibu Agus

Susanti:

1. Bagaimana bagaimana waktu dan tahapan penyaluran dana PKH di kelurahan ini bu?
2. Apakah ibu selaku penerima PKH menanyakan mengapa dana tersebut tidak cair?
3. bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pendamping PKH pada KPM dalam mencapai harapan dan tujuan untuk memandirikan masyarakat miskin dari keadaan keterpurukan ekonomi?
4. Apakah ibu sebagai KPM PKH berperan aktif dalam kegiatan bulanan P2K2?
5. Bagaimana lebih jelasnya bu mengenai dana PKH ibu yang tidak tersalurkan di tahap 4 tahun sebelumnya itu bu?

Lampiran Wawancara kepada Informan Tambahan KPM PKH Ibu Jojor:

1. Apakah ibu merasa layak menerima bantuan PKH ini, dan bagaimana kerapian pegawainya dalam melayani bu?
2. bagaimana sikap pihak kelurahan maupun pendamping PKH ketika melakukan pengurusan yang berkaitan dengan PKH ini bu?
3. apakah ada dari pihak kelurahan maupun pendamping yang datang ke KPM

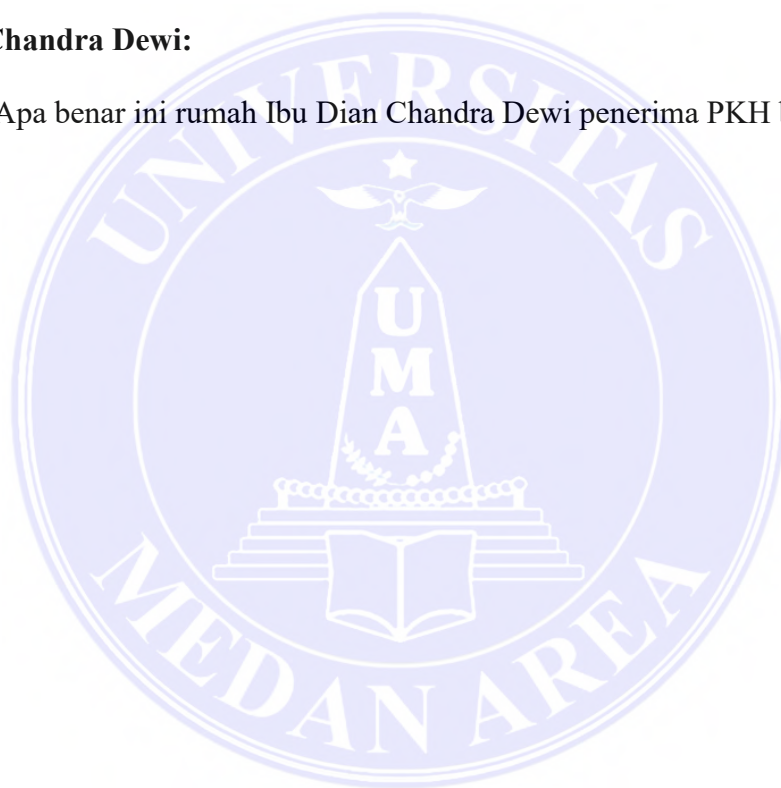
ini bu misalnya melakukan sosialisasi atau kegiatan lainnya?

4. bagaimana komunikasi dengan pihak pendamping jika ada kendala dalam penyaluran dana yang ibu sebutkan sebelumnya?
5. apakah KPM tersebut aktif dalam kegiatan P2K2?
6. Apakah dana yang tidak tersalurkan tersebut mendapatkan dampak besar bagi ibu?

Lampiran Wawancara Informan tambahan PKH kepada seorang Bibi dari

Dian Chandra Dewi:

1. Apa benar ini rumah Ibu Dian Chandra Dewi penerima PKH bu?



Lampiran II Dokumentasi di lapangan



Gambar 1 Kantor Kelurahan Kenangan Baru
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 14 April 2022)



Gambar 2 Kantor Kelurahan Kenangan Baru
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 14 April 2022)



Gambar 3 Foto Bersama Lurah
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 18 April 2022)



Gambar 4 Dokumentasi Wawancara kepada Ibu Windasari
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 11 Mei 2022)



Gambar 5 Dokumentasi foto bersama Seklur
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 20 April 2022)



Gambar 6 Dokumentasi foto bersama KPM Ibu Jojor
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 7 Juni 2022)



Gambar 7 Dokumentasi Rumah KPM Ibu Agus Susanti
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, (6 Juni 2022)



Gambar 8 Dokumentasi Rumah KPM Ibu Dian
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 6 Juni 2022)